

Ali Usman, Ketua PATAKA

Strategi Implementasi Kebijakan: Rekonstruksi Stabilitas Pasokan dan Harga Daging Sapi dan Kerbau India

DASAR PEMIKIRAN

Kebijakan importasi kerbau India tidak lepas keinginan pemerintah dalam menyediakan harga daging murah untuk masyarakat Indonesia. Terutama menjaga keseimbangan pasokan dari fluktuasi harga yang kerap kali terjadi pada saat momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Natal dan Tahun Baru, bulan puasa Ramadhan dan Idul Fitri hingga Idul Adha. Tercatat sejak tahun 2016–2020 kuota impor terpatok 100.000 ton per tahun. Kuota impor terkoreksi menjadi 80.000 ton pada tahun 2021.

KAJIAN EMPIRIS

Sejumlah kalangan menilai penggelontoran daging kerbau India nilai tidak efektif. Justru terjadi sebaliknya, harga daging India terkerek naik, pedagang pasar mencampur (oplosan) dengan daging lokal hingga tudingan pedagang besar mengambil keuntungan margin yang terlampau besar. Sedangkan pemerintah diminta memperhatikan peternak lokal, pembibit, pabrik pakan, obat-obatan, Rumah Pematangan Hewan, logistik hingga seluruh aspek lini usaha hidupnya bergantung dalam usaha daging sapi lokal.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Kebijakan impor *Indian Buffalo Meat* (IBM) perlu dikembalikan kepada tujuan semula. Yaitu melakukan impor dalam keadaan tertentu serta untuk tujuan upaya stabilisasi harga.
2. Diperlukan pengawasan ketat peredaran daging kerbau yang rawan pencampuran saat masuk di pasar becek. Sebab mengakibatkan harga daging segar tertarik kebawah sementara harga daging kerbau beku terangkat naik.
3. Berharap kepada pemerintah untuk mengurangi jumlah impor daging kerbau. Impor dilakukan hanya menjelang pada HBKN, sehingga tidak terjadi lonjakan harga untuk stabilisasi harga.

4. Pemerintah perlu menciptakan usaha kondusif, meng-gairahkan dan membangkitkan minat anak muda menjadi peternak. Harus dilakukan transformasi dari tradisional ke intensif. Membatasi jumlah dan wilayah edar daging kerbau India, guna menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan peternak, pelaku usaha dan feedloter.
5. Perlu didorong peran asosiasi dengan pengenalan teknologi sehingga terjadi optimalisasi produksi dengan pemenuhan kecukupan gizi, dan harga terjangkau. Serta menjaga keberlangsungan peternak rakyat dan pelaku usaha penggemukan (*feedlot*).
6. Pemerintah perlu didorong agar fasilitas dioptimalkan yang ada di peternak. Guna meningkatkan *multiplier effect* peternak, bukan sebaliknya menggerus apalagi mematikan usaha peternak.
7. Keberlangsungan usaha peternak rakyat harus melindungi terutama usaha pembibitan, sehingga harga pedet berujung pada harga daging di konsumen. Maka perlu juga dibiarkan pada angka keekonomian peternak.
8. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan memberdayakan UPT untuk menghasilkan bibit yang bagus. Program harus terfokus sesuai tupoksi masing-masing dan dapat melaksanakan evaluasi.
9. Mahalnya sapi bakalan Australia, pemerintah Indonesia diharapkan mencari sumber alternatif sapi bakalan dari negara lain seperti Meksiko dan Brazil. Karena negara tersebut dianggap bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dibanding India masih belum bebas dari PMK.
10. ID Food diharapkan menciptakan transformasi ekosistem pangan yang terintegrasi hulu-hilir sehingga menciptakan kesejahteraan peternak rakyat. Berdikari anggota holding pangan diharapkan menyelesaikan persoalan hilirisasi pangan dengan efektif. Terutama menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen.
11. Pemerintah perlu merevisi PP No. 04/2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam hal tertentu yang berasal dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan. Importasi daging kerbau dari negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bertentangan dengan UU No. 41/2014 dan keputusan Mahkamah Konstitusi (Amar Putusan MK No. 129/PUU-XIII/2015). Karena Indonesia hanya boleh memasukkan ternak hidup dan produk hewan daging sapi/kerbau dari negara yang bebas penyakit PMK dan atau zona bebas.